KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

1/6							
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4  H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					
A. IDENTITAS PE	ENERIMA PENGHASILA	AN YANG DIPOTONG					
A.1 NPWP : [6 8] [3 3 4] [0 9 7] [0] [1 1 3] [0 0 0							
A.2 NIK : [							
A.3 Nama : YETTY OCTAVIA HUTAHAEAN							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG  MASA PAJAK (mm-yyyy) KODE OBJEK PAJAK		JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	В.3	B.4	NPWP)	B.6	B.7	
3	21-402-01	5.400.000		0	5	270.000	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota							
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen Nama Dokumen Bukti Pembayaran Tanggal 1 5 dd 0 3 mm 2 0 2 2 yyyy  B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor: Tanggal dd mm yyyyy  B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :  B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :		9 5 3 3 5	0 1 6 2 7 2 2	0 0 0			
C.2 Nama Instansi Pemerintah : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR							
C.3 ID Subunit (	Organisasi :						
C.4 Tanggal :		1 5 dd 0 3 mm	2 0 2 2 <i>yyyy</i>				
C.5 Nama Penai	ndatangan :	HARI JUMADI					
C.6 Pernyataan	2.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajak lukan tanda tangan.	r mengatur bahwa d	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	

63H7EU0O